

---

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN EKONOMI INDONESIA

Oleh

Yolanda Ruchiyani<sup>1</sup>, Bambang Suriadi<sup>2</sup>, Nisya Nainita<sup>3</sup>, Nilam Cahaya<sup>4</sup>, Nauval al-ridho<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[yolandaruchiyani8@gmail.com](mailto:yolandaruchiyani8@gmail.com), <sup>2</sup>[sangsurya533@gmail.com](mailto:sangsurya533@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 10-12-2021

Revised: 18-01-2022

Accepted: 20-02-2022

### Keywords:

Kemiskinan, Angka

Partisipasi Kasar,

Dependency Ratio.

**Abstract:** Kemiskinan juga diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau lebih, tujuan-tujuan yang dimaksud di sini tentunya dapat diinterpretasikan sesuai persepsi seseorang. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan berdasarkan kondisi seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan kemiskinan ini tentunya membawa dampak negatif bagi penyandangannya untuk memicu tindakan kriminal, buruknya kesehatan dan pendidikan yang rendah. Risiko terjadinya krisis yang terus berulang sebenarnya telah disadari bersama sehingga perlu ada kesadaran untuk mengelola arsitektur keuangan internasional yang lebih baik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari publikasi resmi pemerintah. Data yang digunakan adalah data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementrian Keuangan. Data dari BPS berasal dari data pengangguran terbuka menurut provinsi pada tahun 2020-2021. Data yang digunakan merujuk pada presentasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pengaruh Angka Partisipasi Kasar (APK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Koefisien regresi dari variabel angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA yaitu  $-1.096064$ . Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada APK, maka tingkat kemiskinan (DR) mengalami penambahan sebanyak 1.096064% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap. Pengaruh APK tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu negatif dan tidak signifikan. APK melihat usia pendidikan secara kasar, maksudnya penduduk yang bukan termasuk usia suatu tingkat pendidikan pun ikut dihitung. Sehingga, APK mengindikasikan suatu keterlambatan yang menyebabkan tidak sesuainya usia dengan tingkat pendidikan yang ditempu. Masih rendahnya APK juga menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

*Tidak berpengaruhnya Dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan Indonesia didominasi oleh penduduk dengan usia kerja yang masih dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduk bukan usia kerja sehingga secara keseluruhan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil ini didukung penelitian yang dibuat oleh Lukitasari (2015) bahwa pengaruh dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat itu negatif dan tidak signifikan. Pengaruh APS tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan. Jika kita amati angka partisipasi sekolah dengan tingkat kemiskinan masih memiliki pergerakan yang cenderung sama dari tahun 2016-2020.*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks tersebut membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Miskin adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain.

Kemiskinan juga diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau lebih, tujuan-tujuan yang dimaksud di sini tentunya dapat diinterpretasikan sesuai persepsi seseorang. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan berdasarkan kondisi seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan kemiskinan ini tentunya membawa dampak negatif bagi penyandanginya untuk memicu tindakan-tindakan kriminal, buruknya kesehatan dan pendidikan yang rendah.

Risiko terjadinya krisis yang terus berulang sebenarnya telah disadari bersama sehingga perlu ada kesadaran untuk mengelola arsitektur keuangan internasional yang lebih baik. Banyak negara yang menyadari perlunya kerjasama antar negara, terutama negaranegara besar yang memiliki pengaruh kuat, dalam mengelola kebijakan ekonomi makro. Negara-negara berkembang, atau lebih dikenal sebagai negara emerging countries,

biasanya lebih mudah terkena dampak terhadap berbagai perubahan kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis besar seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008, menunjukkan Indonesia sangat rentan terhadap berbagai guncangan perekonomian global.

Menurut Market Business News, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB (produk domestik bruto), anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Kejadian ini memang sangat menakutkan. Sebab, akan ada banyak sekali pihak yang dirugikan jika sampai terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Gejala yang muncul saat krisis ekonomi biasanya diawali oleh penurunan belanja dari pemerintah. Lalu, jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja. Selain itu, terjadi pula kenaikan harga pokok yang semakin meroket, penurunan konsumsi yang rendah, penurunan nilai tukar yang tidak terkontrol, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apa yang menjadi factor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia?”

#### **Sumber Kerentanan Ekonomi Indonesia**

Risiko terjadinya krisis yang terus berulang sebenarnya telah disadari bersama sehingga perlu ada kesadaran untuk mengelola arsitektur keuangan internasional yang lebih baik. Banyak negara yang menyadari perlunya kerjasama antar negara, terutama negaranegara besar yang memiliki pengaruh kuat, dalam mengelola kebijakan ekonomi makro. Negara-negara berkembang, atau lebih dikenal sebagai negara emerging countries, biasanya lebih mudah terkena dampak terhadap berbagai perubahan kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis besar seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008, menunjukkan Indonesia sangat rentan terhadap berbagai guncangan perekonomian global. Tambunan (2014), menyebutkan bahwa ada sejumlah alasan mengapa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis krisis (krisis produksi, krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis perdagangan, dan krisis modal) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Perekonomian Indonesia semakin terbuka jika dibandingkan dengan awal Pemerintahan Orde Baru (1966). Reformasi ekonomi khususnya dibidang perdagangan dan keuangan, sebagaimana desakan IMF pasca krisis ekonomi, telah mendorong Indonesia menuju liberalisasi dalam sektor perdagangan, perbankan dan investasi. Kondisi ini telah mengakibatkan perekonomian Indonesia terintegrasi dengan perekonomian dunia. Konsekuensinya, Indonesia semakin rentan terhadap berbagai guncangan perekonomian dunia. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 2008 telah menyebabkan merosotnya permintaan global terhadap produk komoditas yang akhirnya berdampak terhadap ekspor Indonesia. Demikian halnya ketika terjadi krisis di sector keuangan, Indonesia juga rentan terkena dampaknya karena Indonesia telah lama menjadi tujuan investasi jangka pendek di sector keuangan. Ketika terjadi pembalikan arus modal secara tiba-tiba, dapat mengakibatkan depresiasi mata uang Rupiah yang sangat dalam serta dapat memicu krisis sebagaimana tahun

- 1998.
- b) Walaupun dengan laju yang menurun, Indonesia masih bergantung terhadap ekspor dari bahan komoditi primer, seperti pertambangan dan pertanian. Konsekuensinya. Setiap ketidakstabilan permintaan dunia atau guncangan harga terhadap komoditas tersebut khususnya komoditas pertanian akan menjadi guncangan yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Apalagi sektor pertanian saat ini merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, sehingga guncangan harga komoditas pertanian akan secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat petani.
  - c) Dalam dua dekade terakhir, Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan penting, diantaranya gandum, beras, jagung, daging, sayuran, buahbuahan dan minyak. Konsekuensi dari ketergantungan impor ini adalah kenaikan atau ketidakstabilan dari harga makan tersebut di negara asal, jelas akan mempunyai efek negatif yang signifikan tidak hanya terhadap pengeluaran minimum rumah tangga tetapi juga akan mengancam keamanan ketahanan pangan di dalam negeri yang bisa berujung pada kerusuhan sosial dan kejatuhan kabinet yang berkuasa.
  - d) Dalam 20 tahun terakhir semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Bahkan semakin banyak desa di Indonesia yang kehidupan masyarakat atau pembangunan ekonominya bergantung pada pengiriman uang dari TKI di luar negeri. Konsekuensinya, pada saat tuan rumah di mana TKI bekerja mengalami krisis, maka akan memaksa TKI untuk berhenti bekerja, akhirnya dipulangkan dan ujungnya angka kemiskinan di desa akan semakin bertambah.
  - e) Sebagai sebuah negara dengan populasi yang besar, yang artinya konsumsi makanan domestic sangat tinggi, akselerasi pertumbuhan output di sektor pertanian di dalam negeri juga sangat krusial, dan ini bergantung pada beragam faktor seperti faktor cuaca. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera besar yaitu Pasifik dan India, maka Indonesia sangat rentan terhadap perubahan udara yang tidak normal, seperti fenomena el-nino yang sering mengakibatkan gagal panen. Jika yang terjadi pada padi, maka akibatnya bisa menjadi serius. Bukan saja ketahanan pangan yang terancam, tetapi juga dapat berakibat terhadap inflasi yang sangat tinggi (hyperinflasi) dan krisis keuangan karena harus mengimpor beras dalam jumlah yang sangat banyak untuk dibagikan kepada masyarakat miskin.

### **Pembangunan Perekonomian**

Belajar dari krisis ke krisis, Pemerintah Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam menyiapkan pertahanan diri untuk menghadapi situasi yang kurang favorable di masa depan. Bentuk dari pertahanan tersebut berupa sistem dan struktur ekonomi yang dirancang agar tahan terhadap guncangan krisis. Sistem yang dibangun merupakan sinergi dari seluruh pemangku kebijakan ekonomi di Indonesia, baik dari kebijakan fiskal, moneter, pengelolaan perbankan dan industri keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan parastakeholders perekonomian lainnya. Para pemangku kebijakan tersebut memiliki kekuatan untuk membangun struktur perekonomian bangsa agar lebih tahan terhadap gangguan stabilitas

ekonomi. Beberapa ciri struktur ekonomi yang perlu dibangun agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi diantaranya:

- 1) Mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas-komoditas yang sangat strategis, misalnya komoditas pangan (beras, gandum, jagung, gula, dll) dan komoditas energi (minyak dan gas). Kedua komoditas tersebut adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Agar terhindar dari ketergantungan impor, maka sekuat tenaga kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan untuk menyediakan komoditas tersebut dari dalam negeri. Apabila negara tidak mampu menyediakan dan bergantung pada impor, maka terancam mengalami gangguan apabila suply barang-barang tersebut berkurang dan harga-harganya melambung atau disebut gejolak term of trade. Pada masa mendatang ketahanan pangan dan energi akan menjadi kekuatan ekonomi politik yang sangat penting. Kemandirian dalam penyediaan pangan dan energi akan menjadi penopang stabilitas perekonomian.
- 2) Mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditi atau bahan mentah. Saat ini Indonesia dikenal sebagai pengeksportor bahan mentah seperti sawit, kopi, kakao, karet, hasil hutan, produk perikanan seperti udang, dan bahan tambang seperti batu bara dan gas alam. Komoditi tersebut biasanya akan digunakan sebagai bahan baku industri di negara-negara tujuan ekspor. Ketika negara-negara industri seperti China, Amerika dan Jepang mengalami penurunan kinerja ekonomi, maka ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan utama ekspor ikut mengalami penurunan. Hal ini akan berdampak terhadap posisi neraca perdagangan dan penerimaan negara dari transaksi ekspor. Defisit neraca perdagangan dapat membahayakan stabilitas ekonomi, yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan defisit dari ekspor. Apabila kebutuhan mata uang asing terutama USD meningkat untuk kebutuhan ekspor, maka defisit neraca perdagangan dapat menekan nilai tukar rupiah terhadap USD dan yang perlu diwaspadai adalah dampak selanjutnya seperti inflasi. Sebagai jalan keluar, Pemerintah nampaknya perlu menggeser pola ekspor dari bahan mentah dan mendorong masyarakat menciptakan bahan-bahan olahan untuk diekspor sehingga lebih bersaing di pasar internasional.
- 3) Menjaga agar perkembangan sektor keuangan beriringan dengan berkembangnya sektor riil. Kondisi ini tercipta apabila sinergi pemangku kebijakan fiskal dan pemangku kebijakan moneter dilakukan lebih erat lagi. Kementerian Keuangan selaku pemangku kebijakan fiskal adalah otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih baik melalui berbagai kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam APBN. Melalui kebijakan belanja pemerintah (government spending) akan menjadi stimulus masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh Pemerintah. Aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong ekonomi tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pertumbuhan ekonomi tersebut terjaga dengan baik, otoritas moneter yaitu Bank Indonesia mengimbanginya dengan menjaga agar inflasi berada dalam tingkat yang menguntungkan. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam menjaga tingkat inflasi (inflation targeting) melalui berbagai instrumen yang dimilikinya, misalnya dengan menjaga jumlah uang beredar, menjaga jumlah cadangan minimum perbankan (giro wajib minimum), dll. Bauran dari kedua kebijakan tersebut akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- 4) Melakukan pendalaman pasar keuangan (financial market deepening). Pasar keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar keuangan

mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan modal untuk diinvestasikan secara efisien, menyediakan instrumen untuk meningkatkan nilai aset dari para investor, dan meningkatkan stabilitas ekonomi secara umum dengan adanya diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Disamping perannya yang sangat strategis, pasar keuangan perlu diatur secara baik karena seperti kita ketahui pasar keuangan terhubung secara global dengan pasar keuangan internasional yang rawan terhadap guncangan. Pasar keuangan yang dalam dapat didefinisikan sebagai kondisi pasar keuangan yang terus meningkat efisiensinya, penyediaan pembiayaannya, omset pasarnya, semakin luas pangsa pasar dan jenis instrumennya, serta kemudahan dalam memberikan layanan.

Untuk mencegah terjadinya krisis, perlu adanya tindakan preventif. Tindakan preventif tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang harus terus dimonitor. Boediono (ibid hlm 290), menyebutkan beberapa indikator yang harus diwaspadai yaitu:

- Defisit (primer dan total ) APBN
- Sumber pembiayaan defisit (terutama yang rentan perubahan arus modal luar)
- Rasio utang (dalam dan luar negeri) pemerintah terhadap PDB
- Profil jatuh waktu utang Pemerintah
- Pos-pos utama penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dipengaruhi terms of trade
- Utang (dalam dan luar negeri) BUMN dan swasta
- Harga properti, saham, surat utang pemerintah (dan kalau ada obligasi BUMN dan swasta) di pasar sekunder, emas, dan sebagainya
- Laju pertumbuhan kredit perbankan Menjaga indikator-indikator tersebut dalam batas manageable merupakan salah satu pertahanan ekonomi yang dapat mengurangi guncangan dari eksternal. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah prosedur standar yang diterapkan apabila sewaktu-waktu terjadi krisis yang sesungguhnya.

#### **Faktor-Faktor Penyebab Kerentanan Ekonomi Indonesia**

- 1) Ekonomi Indonesia semakin terbuka dibandingkan, pada awal pemerintahan orde baru (1996). Terutama sejak reformasi ekonomi di sejumlah bidang (khususnya perdagangan dan keuangan) secara besar-besaran yang dimulai pada tahun 1999 (sebagai respons langsung pemerintah terhadap krisis keuangan Asia Tahun 1997-1998 dan atas desakan IMF yang datang membantu Indonesia waktu itu) menuju liberalisasi dalam sektor-sektor perdagangan (barang dan jasa), perbankan dan investasi, perekonomian Indonesia semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia. Konsekuensi langsungnya adalah ekonomi Indonesia menjadi semakin rentan dibandingkan sebelumnya terhadap setiap guncangan-guncangan ekonomi dunia seperti yang terjadi pada tahun 2008-2009 tersebut. Krisis ekonomi global itu telah menyebabkan merosotnya permintaan dunia terhadap sejumlah komoditi, termasuk beberapa yang di produksi dan di ekspor oleh Indonesia.
- 2) Indonesia masih tetap bergantung pada ekspor dari banyak komoditi primer, yaitu pertambangan dan pertanian. Konsekuensinya, setiap ketidakstabilan permintaan dunia terhadap komoditi-komoditi tersebut atau guncangan harga-harga dunia dari komoditi. Khususnya pertanian termasuk perkebunan akan menjadi sebuah

- goncangan serius bagi perekonomian Indonesia.
- 3) Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan yang penting, termasuk beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran, buah-buahan dan minyak. Akibatnya adalah kenaikan atau ketidakstabilan dari harga-harga produk makanan tersebut di pasar internasional, atau gagal panen dari produk-produk tersebut di Negara-negara asal.
  - 4) Semakin banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) termasuk wanita, yang bekerja di luar negeri.
  - 5) Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran.

### METODE PENELITIAN

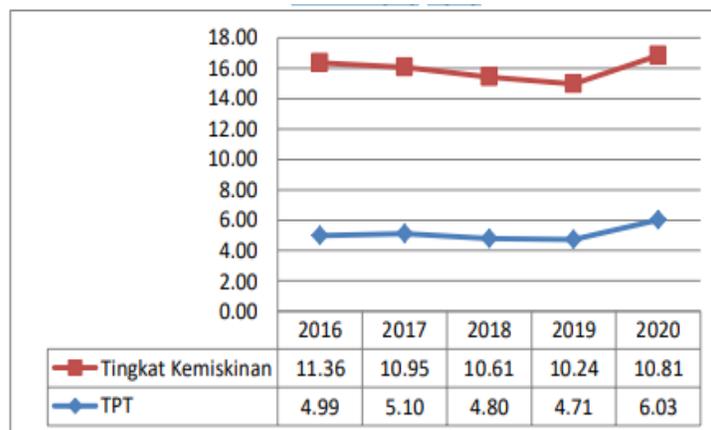
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari publikasi resmi pemerintah. Data yang digunakan adalah data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Data dari BPS berasal dari data pengangguran terbuka menurut provinsi pada tahun 2016-2020. Data yang digunakan merujuk pada presentasi tingkat kemiskinan di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu 5.931240. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada TPT, maka tingkat kemiskinan (PR) mengalami penambahan sebanyak 5.931240% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap.

**Tabel 1. Rata-Rata TPT dan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020**



**Sumber :BadanPusatStatistik(BPS)**

Pengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016- 2020 itu positif dan signifikan. Dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan memiliki pergerakan yang sama. Dimana, penurunan pada tingkat pengangguran terbuka akan membuat tingkat kemiskinan juga menurun. Penurunan ini disebabkan oleh semakin bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2016-2019 keduanya terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 kembali

mengalami kenaikan secara bersamaan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Berlaku juga sebaliknya, peningkatan tingkat pengangguran terbuka mengakibatkan terjadinya peningkatan pada tingkat kemiskinan. Hasil ini didukung penelitian yang dibuat oleh Putra & Arka (2018) bahwa pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali itu positif dan signifikan.

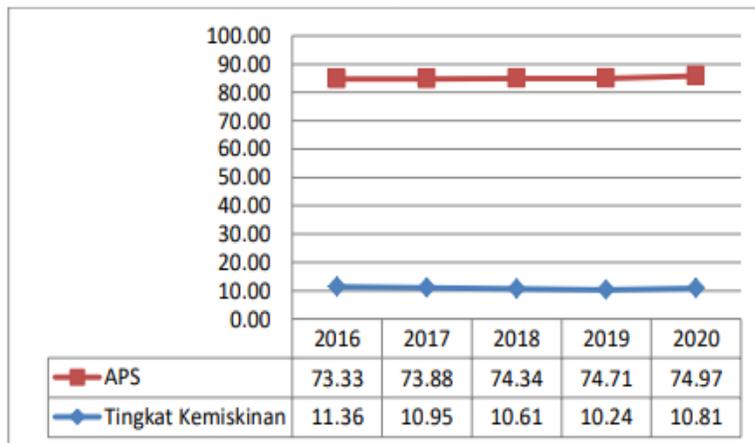
### Pengaruh Dependency Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi dari dependency ratio (DR) yaitu 1.320409. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada DR, maka tingkat kemiskinan (PR) mengalami penurunan sebanyak 1.320409% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap. Pengaruh dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu negatif dan tidak signifikan. Tidak berpengaruhnya Dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan Indonesia didominasi oleh penduduk dengan usia kerja yang masih dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduk bukan usia kerja sehingga secara keseluruhan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil ini didukung penelitian yang dibuat oleh Lukitasari (2015) bahwa pengaruh dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat itu negatif dan tidak signifikan.

### Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi dari angka partisipasi sekolah (APS) tingkat SMA yaitu - 6.391443. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada APS, maka tingkat kemiskinan (PR) mengalami peningkatan sebanyak 6.391443% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap

**Tabel 2. Rata-Rata APS dan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber :BadanPusatStatistik(BPS)

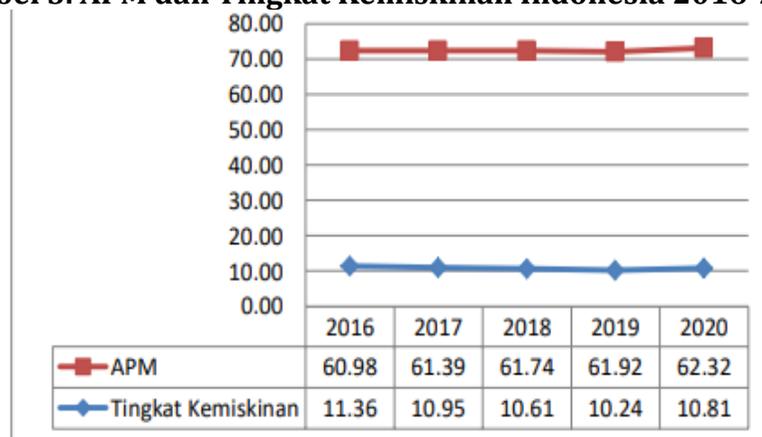
Pengaruh APS tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan. Jika dilihat dari gambar, dapat diketahui bahwa angka partisipasi sekolah dengan tingkat kemiskinan memiliki pergerakan yang cenderung sama dari tahun 2016-2020. Terutama pada tahun 2020, meningkatnya APS disertai dengan peningkatan tingkat kemiskinan, dikarenakan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada kenaikan APS yang justru meingkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan APS tidak dibarengi dengan kelebihan sumber daya manusia yang dimiliki,

maka kemiskinan pun meningkat karena tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan APS, belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia. Selain itu, faktor ketidakmampuan untuk menikmati pendidikan juga masih menjadi kendala bagi Indonesia sehingga pada akhirnya kemiskinan semakin meningkat. Hasil ini didukung penelitian yang dibuat oleh Nirwana (2013) bahwa pengaruh tingkat pendidikan (APS) terhadap persentase penduduk miskin 33 provinsi di Indonesia itu positif dan signifikan.

### **Pengaruh Angka Partisipasi Murni (APM) Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Koefisien regresi dari variabel angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA yaitu 2.401503. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada APM, maka tingkat kemiskinan (DR) mengalami penambahan sebanyak 2.401503% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap.

**Tabel 3. APM dan Tingkat Kemiskinan Indonesia 2016-2020**



**Sumber :BadanPusatStatistik(BPS)**

Pengaruh APM tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan. Jika dilihat, APM dan tingkat kemiskinan mempunyai pergerakan yang hampir sama dari tahun 2016-2020. Kenaikan APM akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya wilayah di Indonesia dengan tingkat partisipasi pendidikan di mana terdapat usia yang lebih tua ikut dihitung dalam partisipasi jenjang pendidikan tertentu. Sehingga menimbulkan permasalahan baru karena seharusnya usia tersebut sudah dapat mencari pekerjaan. Sehingga pada akhirnya peningkatan kemiskinan pun terjadi. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Hikma et al. (2019) bahwa pengaruh APM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah itu positif dan signifikan.

Pengaruh Angka Partisipasi Kasar (APK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Koefisien regresi dari variabel angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA yaitu -1.096064. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada APK, maka tingkat kemiskinan (DR) mengalami penambahan sebanyak 1.096064% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap. Pengaruh APK tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu negatif dan tidak signifikan. APK melihat usia pendidikan secara kasar, maksudnya penduduk yang bukan termasuk usia suatu tingkat pendidikan pun ikut dihitung. Sehingga, APK mengindikasikan suatu keterlambatan yang menyebabkan tidak sesuainya usia dengan tingkat pendidikan yang ditempu. Masih

rendahnya APK juga menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, belum meratanya program KIP di Indonesia sehingga masih banyak penduduk Indonesia yang putus sekolah yang mengakibatkan belum terlihat signifikan perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini didukung penelitian yang dibuat Amaliah (2015) bahwa pengaruh angka partisipasi kasar terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta itu tidak signifikan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari publikasi resmi pemerintah dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016- 2020 itu positif dan signifikan. Untuk mencegah terjadinya krisis, perlu adanya tindakan preventif. Tindakan preventif tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang harus terus dimonitor.

Tidak berpengaruhnya Dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan Indonesia didominasi oleh penduduk dengan usia kerja yang masih dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduk bukan usia kerja sehingga secara keseluruhan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil ini didukung penelitian yang dibuat oleh Lukitasari (2015) bahwa pengaruh dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat itu negatif dan tidak signifikan.

Pengaruh APS tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan. Jika kita amati angka partisipasi sekolah dengan tingkat kemiskinan masih memiliki pergerakan yang cenderung sama dari tahun 2016-2020. Terutama pada tahun 2020, semenjak adanya covid-19 meningkatnya tingkat kemiskinan dan berkurangnya pendidikan dikarenakan tidaknya penghasilan dari tenaga kerja, dan pemerintah belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia. Selain itu, faktor ketidakmampuan untuk menikmati pendidikan juga masih menjadi kendala bagi Indonesia sehingga pada akhirnya kemiskinan semakin meningkat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Itang, (2017). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan kebudayaan V(16), No. 1
- [2] Boediono, (2016). Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah. Bandung. Mizan pustaka